LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

K E C A M A T A N P U N C U

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PUNCU
Jalan Puncak Nomor 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri
Telepon (0354) 392201, Pos-el kecamatanpuncu@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 000.8.6.3/20.1/418.87/2025
TENTANG
HASIL RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PUNCU
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, 9 Januari 2025 bertempat di Ruang Rapat Camat Puncu, disampaikan hasil rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut;

Pimpinan Rapat
1. Camat Puncu

Peserta Rapat
1. Sekretaris Kecamatan Puncu
2. Kasi Pemerintahan, Kecamatan Puncu
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Puncu
4. Kasi Kesejahteraan Sosial, Kecamatan Puncu
5. Kasubbag Penyusun Program dan Keuangan
6. Kasubbag Umum dan Pelayanan

Hasil Rapat
1. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disampaikan;
2. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah direview secara berjenjang oleh masing-masing bidang/seksi dan merupakan perbaikan atas saran dan masukan (sebagaimana terlampir);

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1. Sekretaris Kecamatan Puncu
SUTRISNO,SE
NIP. 19830407 201001 1 023 **1. .....**

2. Kasi Pemerintahan, Kecamatan Puncu
BAGUS SURYO JATMIKO,S.STP,M.H
NIP. 19891230 201010 1 001 **2. .....**

3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Puncu
GUNAWAN PUTRA PRIBADI,S.Si **3. .....**
NIP. 19780621 200904 1 002

4 Kasi Kesejahteraan Sosial, Kecamatan Puncu
SUDARSIH, A.Md.Kep **4. .....**
NIP. 19761125 201001 2 004

5 Kasubbag Penyusun Program dan Keuangan
INDAH ANGRIANI,S.Kom
NIP. 19910825 201503 2 002 5. .....

6 Kasubbag Umum dan Pelayanan
Ir. SUDARMI
NIP. 19671108 200312 2 004 6. .....

Puncu, 9 Januari 2025
CAMAT PUNCU

FIRMAN TAPPA, S.STP., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19780711 199810 1 002

Lampiran Berita Acara
Nomor : 000.8.6.3/20.1/418.87/2025
Tanggal : 9 Januari 2025

Matrikulasi Perbaikan Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
KECAMATAN PUNCU

Pengusul	Usulan Perbaikan	Tindak Lanjut Perbaikan
Camat	Perbaiki data Capaian Kinerja Utama Organisasi di Tabel Keandalan Perhitungan dan Analisa Data Kinerja	Data sudah diperbaiki
Sekretaris Kecamatan	Perbaiki Tabel 3.1.3.a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Data sudah diperbaiki
Sekretaris Kecamatan	Perbaikan narasi pada Pelaksanaan Kinerja Organisasi disamakan dengan	Data sudah diperbaiki

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Puncu Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui dengan bergulirnya era reformasi, telah membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini dengan mengakomodasi praktik-praktik kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan aspiratif. Prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi implementasi *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Puncu Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Selain itu, dokumen LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja, dan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Puncu pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Puncu Tahun 2024.

Puncu, Januari 2025
CAMAT PUNCU

FIRMAN TAPPA, S.STP., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19780711 199810 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Puncu Tahun 2021 – 2026.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puncu menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu	100	93,83	97,00	Baik

Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pagu Anggaran (Setelah PAK)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
2.750.868.004	2.582.035.691	**93,86%**

Data capaian kinerja dan keuangan diatas diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada tahun ke tahun berikutnya. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut.

DAFTAR ISI

Berita Acara Penyusunan Laporan Kinerja
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
1. BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum Organisasi
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Pelaporan
- 1.6. Permasalahan Strategis

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
- 2.1. Cascading Kinerja
- 2.2. Rencana Strategis
- 2.3. Perjanjian Kinerja
- 2.4. Rencana Kerja dan Anggaran

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- 3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi
  - **1.1.1.** Capaian Kinerja Utama Organisasi
  - 1.1.2. Capaian Anggaran Kinerja Utama
  - 1.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran
  - 1.1.4. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya
  - 1.1.5. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah
  - 1.1.6. Benchmarking
  - 1.1.7. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja
- 3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi
  - 1.1.1. Pelaksanaan Kinerja Organisasi
  - 1.1.2. Analisis Keterlibatan Pihak Lain
  - 1.1.3. Analisis Faktor Pendukung
  - 1.1.4. Analisis Faktor Penghambat
  - 1.1.5. Rencana Tindak Lanjut
  - 1.1.6. Penghargaan dan Apresiasi Kinerja
  - 1.1.7. Realisasi Kinerja Anggaran

2. BAB IV PENUTUP
3. LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.2.a Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis Kecamatan Puncu
2. Tabel 2.2.b Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Puncu
3. Tabel 2.3.a Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
4. Tabel 2.3.b Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
5. Tabel 2.4.a Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
6. Tabel 3.1.1.a Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja
7. Tabel 3.1.2.a Capaian Anggaran Kecamatan Puncu Tahun 2024
8. Tabel 3.1.3.a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
9. Tabel 3.1.4.a Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya
10. Tabel 3.1.5.a Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah
11. Tabel 3.1.6.a Data Benchmarking Realisasi Kinerja
12. Target 3.1.7.a Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja
13. Tabel 3.2.1.a Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya
14. Tabel 3.3.a Tabel Realisasi Kinerja Anggaran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*) diperlukan adanya Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat:

1. Mendorong Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenteram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri terhadap penyelenggara pemerintahan.

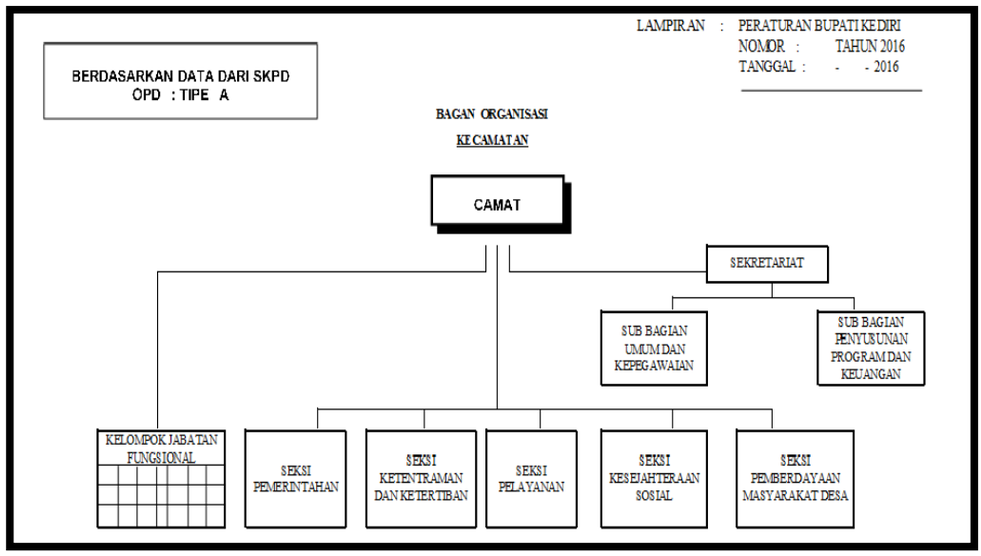
1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan Puncu

1.2.2 Alamat Organisasi : Jalan Puncak No. 1 Desa Puncu.

1.2.3 Struktur Organisasi :

Struktur organisasi Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1.



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A di mana Camat selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
   a. Seksi Pemerintahan;
   b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
   c. Seksi Pelayanan;
   d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
   e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Tugas dan Fungsi

1.3.1 Visi

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri **Mendukung visi Kabupaten Kediri** yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani"**.

1.3.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan dan merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan mewujudkan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 ada 8 (Delapan) Misi. Diantara 8 (Delapan) Misi tersebut Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri **Mendukung Misi 2 Kabupaten Kediri** yaitu **"Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik"**.

1.3.3 Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kecamatan (Camat) mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

1.3.4 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
e. Pelaksanaan pelayanan umum;
f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
7. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri;
8. Keputusan Camat Puncu nomor 188/32/418.87/2021 tentang Penetapan Indikator KInerja Utama (IKU) Kecamatan Puncu Tahun 2021 – 2026

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan umum tentang profil, tugas, fungsi dan struktur organisasi serta mandat dan peran dari Kecamatan Puncu serta Permasalahan Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai hubungan RPJMD dan Renstra, *Cascading* dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data Lampiran yang diperlukan.

1.6 Permasalahan Strategis

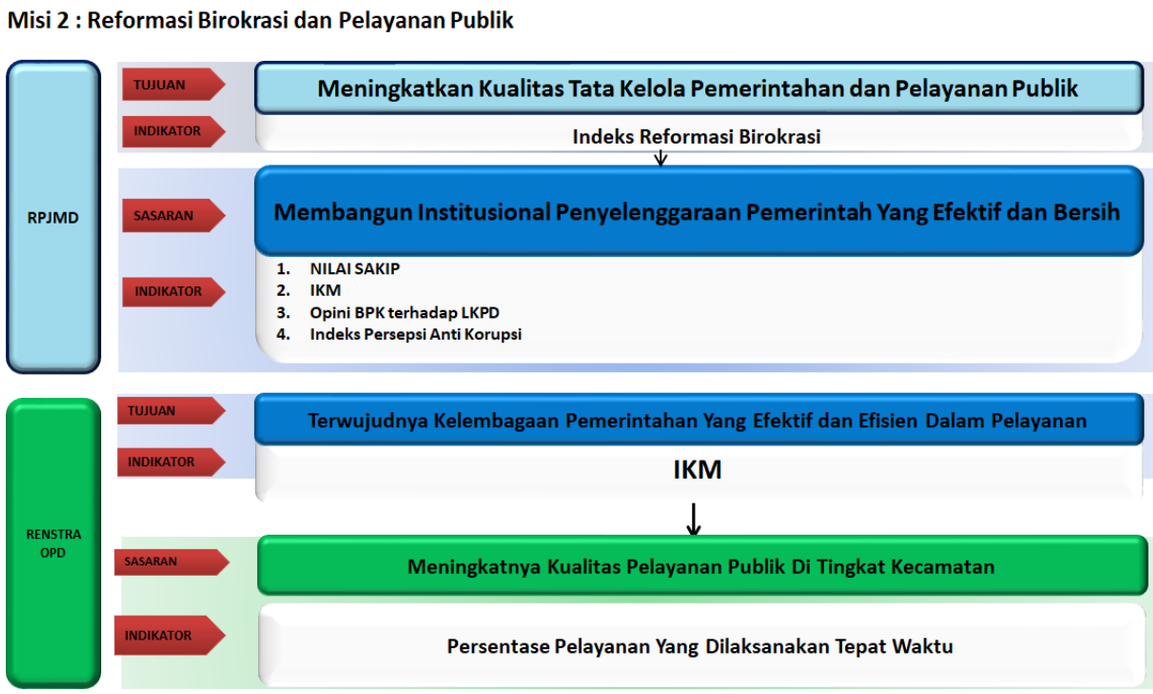
Permasalahan Strategis telah diidentifikasikan guna mengetahui potensi permasalahan yang penting, mendesak, signifikan dan mendasar untuk segera ditindaklanjuti. Berikut adalah permasalahan strategis dari Kecamatan Puncu adalah sebagai berikut;

a. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup berkembang dengan baik, namun terkait izin PIRT masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PIRT bagi usaha mereka. Selain itu usaha untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah juga masih minim.
b. Minimnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini secara langsung memberikan implikasi terhadap pelayanan publik dan digeneralisasi oleh masyarakat bahwasanya Birokrasi yang ada di pemerintahan masih berbelit-belit.
c. Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan Kepala Desa dan latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 Program Pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi. Selain itu, gerakan PKK secara internal masih menghadapi permasalahan terkait dengan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, dukungan dana), sedangkan secara eksternal masih ada kebijakan yang belum berpihak dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
e. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keberadaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat sehingga kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
f. Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia yang tersedia, bahkan seringkali terjadi *overlaping* tupoksi aparatur sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 *Cascading Kinerja*

Cascading Kinerja digunakan untuk mengetahui dukungan kinerja dari Perangkat Daerah menuju kinerja Pemerintah Daerah. Peran dan dukungan ini digunakan untuk mengetahui peran dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah. Cascading dari Kecamatan Puncu adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2.1.a Cascading Kinerja Kecamatan Puncu

Dari Cascading diatas ditampilkan bahwa Kecamatan Puncu mendapatkan mandat dari Bupati Kediri untuk mengawal Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan Sasaran Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih.

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis OPD disusun setelah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan dalam mendukung pencapaian Misi ke 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius ditetapkan tujuan Kecamatan Puncu **yakni terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelayanan** dengan sasaran **meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.**

Dijelaskan dalam matriks perencanaan kinerja strategis Kecamatan Puncu sebagai berikut;

Tabel 2.2.a Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis Kecamatan Puncu

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi						
		Capaian Nilai IKM Kecamatan	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00

Metode Pengukuran dan Perhitungan Indikator dijelaskan dalam matriks berikut;

Tabel 2.2.b Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis Kec. Puncu

Indikator	Formula	Sumber Data (Perangkat Verifikasi)
Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu / Jumlah pelayanan yang dilaksanakan dalam 1 tahun X 100%	Dokumen Laporan Hasil Pengajuan Pelayanan di Kecamatan Puncu dalam 1 Tahun

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2024, Camat Puncu telah menyepakati Sasaran, Indikator dan Target kinerja dengan Bupati Kediri. Terdapat beberapa penyesuaian dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini, terutama sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB untuk mengganti target apabila realisasi tahun sebelumnya telah melampaui target tahun berikutnya dalam Renstra menjadi lebih realistis yakni dengan meningkatkan (lebih tinggi) atau mempertahankan (sama) dengan realisasi tahun sebelumnya. Selain hal tersebut, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sebagai penyelarasan ulang atas Perubahan Anggaran Kerja (PAK), Pergantian atau mutasi Pejabat, Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta hal-hal lain yang diatur dalam PermenPANRB 53 Tahun 2014. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Puncu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.a Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100 %

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka ditetapkanlah Program dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3.b Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Program	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	209.174.124
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.	14.238.800
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	9.568.600
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	1.940.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	59.750.400
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahaan Desa	Rp.	61.245.600
Jumlah Anggaran		Rp.	355.917.524

Pada Bulan Agustus ada penambahan Dana Alokasi Khusus Fiskal sebesar Rp. 31.000.000,- pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sehingga jumlah anggaran keseluruhan pada Kecamatan Puncu menjadi Rp. 386.917.524,00

2.4 Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2024, ditetapkanlah RKA setelah PAK Tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 2.4.a Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**100%**	**2.573.124.604**
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun***	**100%**	**3.683.600**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	1	**860.000**
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	1	**920.000**
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	1	**980.000**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisarRealisasi Kinerja SKPD	1	**923.600**
7.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Te rlaksana***	**100%**	**2.444.175.780**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Yang Dilaksanakan	6	**2.363.950.480**
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	11	**31.199.600**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Yang Dilaksanakan	3	**46.320.000**
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	1	**965.000**
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	1	**1.740.700**
7.01.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan***	**100%**	**845.600**
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	3	**845.600**
7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana***	**100%**	**28.081.500**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana	1	**4.020.700**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	**0**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan	4	**5.673.200**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3	**2.547.600**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	12	**15.840.000**
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	0	**0**
7.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah***	**100%**	**0**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0	**0**
7.01.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan***	**100%**	**40.908.310**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	3	**11.786.310**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan	4	**29.122.000**
7.01.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana***	**100%**	**55.429.814**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan	2	**19.500.000**
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dilaksanakan	0	**0**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terlaksana	0	**1.500.000**
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	1	**34.429.814**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100%**	**14.238.800**
7.01.02.2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	**100%**	**3.985.200**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	**1.978.000**
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	**2.007.200**
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	**100%**	**4.253.600**
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	1	**2.088.000**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	**2.165.600**
7.01.02.2.04	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	**100%**	**6.000.000**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	**6.000.000**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**	**40.568.600**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**40.568.600**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	**4.930.000**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	**35.638.600**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**	**1.940.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman**	**100%**	**1.940.000**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.)
	dan Ketertiban Umum	**dan Ketertiban Umum**		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	**1.940.000**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100%**	**59.750.400**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**59.750.400**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	**25.320.000**
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	**34.430.400**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**100%**	**61.245.600**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**61.245.600**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Terfasiltasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	**3.506.000**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	**4.048.800**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	**3.690.800**
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	**50.000.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Kediri. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Organisasi
b. Realisasi Anggaran

3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kecamatan Puncu dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja.

Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kinerja yakni Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami. Dalam hal ini, penyampaian capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut;

1. Persentase Capaian Positif : Realisasi/Target x 100%
2. Persentase Capaian Negatif :Target-(Realisasi-Target)/Target x 100%

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian Kecamatan Puncu ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian pengukuran Katagori Kinerja dengan skala sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
2. Kategori Baik apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
3. Kategori Cukup Baik apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
4. Kategori Kurang Baik apabila Capaian kurang dari 60%.

Adapun capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.a Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	100	Sangat baik

Dari data diatas, sebanyak satu indikator kinerja utama masuk dalam kategori kinerja sangat berhasil

Keandalan Perhitungan dan Analisa Data Kinerja akan disampaikan sebagai berikut:

Indikator	Formula	Operasionalisasi	Hasil Perhitungan	Dokumen Dasar Perhitungan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu ----------X100% Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1.865 —---------- x100% 1.865	100%	Data Pelayanan Kec Puncu Bulan Januari s/d Desember 2024

Pemohon Pelayanan selama tahun 2024 (periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024) di kantor Kecamatan Puncu sebanyak 1865 orang . Adapun rincian jenis permohonan layanan adalah sebagaimana table berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pemohon											
		jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agst	sept	okt	nov	des
1	SKCK	39	22	23	68	98	55	76	36	27	38	29	23
2	SKTM	8	13	26	21	19	22	15	15	16	20	15	14
3	PROPOSAL	0	3	4	2	6	3	2	7	1	4	1	25
4	IZIN KERAMAIAN	15	5	8	7	8	43	31	38	16	26	24	17
5	DISPENSASI NIKAH	8	12	1	14	3	12	3	12	2	8	4	10
6	SUKET WARIS	14	8	7	7	7	11	9	1	12	11	8	7

7	SUKET PENCAIRAN SPP DESA	0	3	33	49	43	25	67	39	48	70	93	85
8	REGISTER LAIN LAIN	7	8	11	20	7	8	3	1	3	3	11	3
	JUMLAH	91	74	113	188	191	179	206	149	125	180	185	184

Dalam upaya mendukung hal tersebut, telah dilaksanan berbagai macam aksi untuk mendukung capaian tersebut sebagai berikut;

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung di ruang pelayanan, dengan menambah fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan pemohon layanan antara lain:
2. Jam Pelayanan mulai pukul 07.15 s/d 15.30 untuk Hari senin - Kamis dan pukul 07.00 s/d 11.30 pada hari Jum'at
3. Petugas yang ada di ruang pelayanan sejumlah 3 orang, sehingga mencegah terjadinya antrian yang panjang.

3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama

Capaian Anggaran Organisasi disampaikan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian anggaran dihitung menggunakan cara realisasi dibagi dengan pagu dikalikan 100%. Adapun hasil capaian anggaran Organisasi adalah sebagai berikut;

Tabel 3.1.2.a Capaian Anggaran Kecamatan Puncu Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran			Zona Penyerapan Anggaran
		Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	2.750.868.004	2.582.035.691	93,86%	Zona Hijau

Dari data diatas, sebanyak 1 (satu) indikator dalam zona Hijau penyerapan anggaran.
Penyampaian zona penerapan anggaran tersebut dijadikan rujukan dalam menghubungkan hubungan antara ketercapaian kinerja dan capaian anggaran. Secara teknis hubungan ketercapaian kinerja dan anggaran tersebut disampaikan dalam bagian berikutnya yakni perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Untuk melihat efisiensi anggaran, maka digunakanlah rumus capaian kinerja dikurangi dengan capaian anggaran. Apabila hasilnya menunjukkan angka lebih dari 0 maka dapat dikatakan efisien, namun apabila di bawah 0 maka dapat dikatakan tidak efisien. Namun demikian,

capaian kinerja haruslah sama atau diatas 100%, karena dengan demikian capaiannya akan sudah efektif. Apabila capaian kinerja belum efektif (belum 100%), maka dapat disebutkan penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien.

Tabel 3.1.3.a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Capaian Kinerja*	Capaian Anggaran**	Efisiensi***	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100	93,86	6,14	Efisien

*) Data diambil dari kolom capaian kinerja Tabel 3.1.a

**) Data diambil dari kolom capaian anggaran Tabel 3.2.a

***) Data dihitung dengan capaian kinerja dikurangi capaian anggaran dengan syarat capaian kinerja harus sama atau diatas 100%.

Dari data diatas, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja masuk dalam kategori kinerja Efisien .Data efisiensi kinerja ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja tahun berikutnya, dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Untuk perhitungan Program dan Kegiatan tidak Masuk dalam perhitungan sub-bab ini, karena akan dibahas pada sub-bab 3.1.7.

3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Dalam melihat konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun, ditampilkan realisasi kinerja dari dua tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun digunakan untuk mengetahui fluktuasi peningkatan apakah meningkat secara konsisten, bertahan, fluktuatif atau menurun secara konsisten. Dari perbandingan realisasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, terutama perbaikan-perbaikan kinerja.

Tabel 3.1.4.a Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2022	2023	2024	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	100%	Stabil dan Konsisten

Dari data diatas, sebanyak 1 indikator kinerja dengan keterangan konsisten.

3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.5.a Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		Realisasi	Target RPJMD	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100	100	100	

Dari data diatas, tidak ada indikator yang melebihi target jangka menengah dan tidak terdapat indikator yang masih dibawah target jangka menengah. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan target perencanaan tahun berikutnya.

3.1.6 *Benchmarking*

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.6.a Data *Benchmarking* Realisasi Kinerja

Indikator	Nasional	Provinsi	Kab/Kota Lain	Keterangan
Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	nihil	nihil	nihil	Tidak ada data

3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Untuk mengetahui Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja diperoleh dengan cara sebagai berikut;

1. Kategori Kinerja ditentukan sesuai dengan perhitungan pada sub-bab sebelumnya;
2. Dukungan Terhadap Kinerja ditentukan dengan kategori dukungan sebagai berikut;
    a. Kategori Sangat Mendukung apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%

b. Kategori Mendukung apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
c. Kategori Cukup Mendukung apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
d. Kategori Kurang Mendukung apabila Capaian kurang dari 60%.

Target 3.1.7.a Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kgagalan Kinerja

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	**100%**	93,88%	93,88%	Sangat Mendukung	Semua kegiatan dalam program ini sangat mendukungkebersihan tercapainya kinerja yang baik.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**100%**	93,55%	93,55%	Sangat Mendukung	Semua kegiatan dalam program ini sangat mendukungkebersihan tercapainya kinerja yang baik.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Terselenggaranya Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	**100%**	100%	100%	Sangat Mendukung	Semua kegiatan dalam program ini sangat mendukungkebersihan tercapainya kinerja yang baik.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya Program Ketentraman dan ketertiban Umum	**100%**	100%	100%	Sangat Mendukung	Semua kegiatan dalam program ini sangat mendukungkebersihan tercapainya kinerja yang baik.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	**100%**	100%	100%	Sangat Mendukung	Semua kegiatan dalam program ini sangat mendukungkebersihan tercapainya kinerja yang baik.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Terselenggaranya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**100%**	98,37%	98,37%	Sangat Mendukung	Semua kegiatan dalam program ini sangat mendukungkebersihan tercapainya kinerja yang baik.

Dari data diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat 6 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Sangat Mendukung;
2. Terdapat 0 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Mendukung;
3. Terdapat 0 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Cukup Mendukung;
4. Terdapat 0 Program/Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Kurang Mendukung;

Data diatas, akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya untuk mengetahui Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang sangat menunjang, menunjang, cukup menunjang, dan kurang menunjang untuk dioptimalkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Kinerja Organisasi disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dilaksanakan dengan narasi-narasi atas apa yang dilaksanakan selama satu tahun ini. Berikut adalah upaya-upaya pelaksanaan kinerja organisasi seperti berikut;

1. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya

Tabel 3.2.1.a Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya;

Rencana Tindak Lanjut Tahun sebelumnya	Upaya yang telah dilaksanakan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Desa
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Mengkoordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Memperingati HUT Kabupaten Kediri
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Menyelenggarakan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Melaksanakan kegiatan Pleno PKK
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Melaksanakan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan di Tingkat Kecamatan (KAPOLSEK, DANRAMIL, Kepala PUSKEMAS, KUA)
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Menfasilitasi Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Monitoring Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Menyelenggarakan Bimtek Kepada Ketua RT dan RW Dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

2. Pelaksanaan Kinerja Organisasi
    a. Sasaran Strategis 1

    Sasaran Strategis Kecamatan Puncu adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan**. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima menjadi tujuan dari Kecamatan Puncu. Salah satu indikator meningkatnya kualitas pelayanan Publik yaitu meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Puncu yang dilakukan setiap hari.

3.2.2 Analisis Keterlibatan Pihak Lain

Pihak yang terlibat dalam menunjang pencapaian kinerja dapat dipetakan sebagai berikut;

1. Pihak Internal Pemerintah Kabupaten Kediri
    a. Beberapa OPD yang menunjang pencapaian kinerja adalah :
        1. Bagian Organisasi
           Mendukung dalam meningkatnya pelayanan di Kecamatan Puncu menuju pelayanan prima dengan adanya penilaian KIAN PRIMA
        2. BPKAD
           Menyediakan anggaran yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan di Kecamatan Puncu
        3. Bappeda
           Mendukung dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan di Kecamatan Puncu
        4. Bagian Pembangunan
           Mendukung pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Puncu
        5. BKD
           Mendukung meningkatkan kinerja ASN di Lingkup Kecamatan Puncu
        6. Dinas Perkim
           Mendukung menyediakan Gedung dan sarana prasarana yang mendukung dalam meningkatnya kinerja pelayanan di Kecamatan Puncu
        7. DPMPD
           Mendukung perkembangan desa di Kecamatan Puncu menjadi desa yang mandiri,
        8. DKPP
           Mendukung perkembangan perternakan di wilayah Kecamatan Puncu
        9. Dinas Pertanian dan Perkebunan
           Mendukung perkembangan pertanian dan perkebunan di wilayah Kecamatan Puncu

2. Pihak Instansi Vertikal
    a. Beberapa pihak Instansi Vertikal yang melakukan koordinasi denga Kecamatan Puncu adalah
        1. Polsek Kecamatan Puncu dan Koramil Kec. Puncu
           memiliki peran dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat di kecamatan, yang pada gilirannya mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan.
        2. Kantor Urusan Agama, Kec. Puncu
           Mendukung urusan administrasu pernikahan dan agama pada bidang pelayanan masyarakat

3. UPT. Puskesmas Kec. Puncu dan Penyuluh KB
   mendukung pelaksanaan program kecamatan pada bidang kesehatan dan keluarga
4. SKPD pada Bid. Pendidikan (Dinas Pendidikan)
   mendukung pelaksanaan program kecamatan pada bidang pendidikan
5. SKPD pada Bid. Sosial (PKH, TKSK)
   mendukung pelaksanaan program kecamatan pada bidang sosial

3. *Stakeholder,* Pihak Swasta dan Masyarakat
   Pihak stakeholder yang mendukung pelaksanaan kinerja Kecamatan Puncu salah satunya adalah Bank Jatim.

3.2.3 Analisis Faktor Pendukung

Berikut adalah beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja;

1. Manajemen Internal:
   sudah bagus, sudah ada SOP terkait Pelayanan Publik
2. SDM:
   Sudah handal dan kompeten di bidangnya
3. Keuangan:
   Didukung dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di unit pelayanan
4. Masyarakat :
   Selaku penerima layanan sudah disiplin dan tertib dalam menunggu antrian

3.2.4 Analisis Faktor Penghambat

Berikut adalah beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja;

1. Manajemen Internal:
   Kurangnya evaluasi terhadap kinerja pelayanan
2. SDM:
   Kurangnya peningkatan kompetensi SDM
3. Keuangan:
   SDM Masih terbatasnya anggaran
4. Masyarakat :
   Pemohon lansia memerlukan waktu yang cukup lama untuk dilayani

3.2.5 Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah beberapa hal yang akan ditindaklanjuti dalam kinerja;

1. Manajemen Internal:
   Mengadakan evaluasi tiap Minggu dalam meningkatkan kinerja pelayanan
2. SDM:
   Meningkatkan komptensi SDM di Bidang pelayanan
3. Keuangan:

Penambahan anggaran untuk meningkatkan fasilitas pendukung dan kualitas

4. Masyarakat :
   Penambahan fasilitas untuk mendukung peningkatan pelayanan Publik

3.2.6 Penghargaan dan Apresiasi Kinerja

Selama Tahun 2024 Belum ada Penghargaan dan Apresiasi Kinerja yang diterima Kecamatan Puncu

3.3 Realisasi Kinerja Anggaran

Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.3.a Tabel Realisasi Kinerja Anggaran

Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**2.573.124.604**	**2.407.392.291**	**93,60**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun***	**3.683.600**	**3.683.600**	**100,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	860.000	860.000	**100,00**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	920.000	920.000	**100,00**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Tersusun	980.000	980.000	**100,00**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisarRealisasi Kinerja SKPD	923.600	923.600	**100,00**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Te rlaksana***	**2.444.175.780**	**2.282.801.436**	**93,44**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Yang Dilaksanakan	2.363.950.480	2.206.599.183	**93,34**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	31.199.600	28.126.553	**90,15**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Yang Dilaksanakan	46.320.000	46.320.000	**100,00**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tersusun	965.000	965.000	**100,00**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	1.740.700	1.740.700	**100,00**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan***	**845.600**	**845.600**	**100,00**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang	845.600	845.600	**100,00**

	yang Tersusun			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Yang Terlaksana***	**28.081.500**	**28.053.900**	**99,90**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana	4.020.700	4.020.700	**100,00**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.673.200	5.673.200	**100,00**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan	2.547.600	2.520.000	**98,92**
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.840.000	15.840.000	**100,00**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	**40.908.310**	**38.714.005**	**94,64**
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	11.786.310	9.599.605	**81,45**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah***	29.122.000	29.114.400	**99,97**
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	**55.429.814**	**53.293.750**	**96,15**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan***	19.500.000	18.323.000	**93,96**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	1.500.000	1.500.000	**100,00**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilaksanakan	34.429.814	33.470.750	**97,21**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana***	**14.238.800**	**11.188.800**	**78,58**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan	**3.985.200**	**3.935.200**	**98,75**
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Dilaksanakan	1.978.000	1.978.000	**100,00**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terlaksana	2.007.200	1.957.200	**97,51**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	**4.253.600**	**4.253.600**	**100,00**

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	2.088.000	2.088.000	**100,00**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	2.165.600	2.165.600	**100,00**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**6.000.000**	**3.000.000**	**50,00**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000	3.000.000	**50,00**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	***Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	**40.568.600**	**40.568.600**	**100,00**
Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	**40.568.600**	**40.568.600**	**100,00**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.930.000	4.930.000	**100,00**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	***Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	35.638.600	35.638.600	**100,00**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**1.940.000**	**1.940.000**	**100,00**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.940.000**	**1.940.000**	**100,00**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	1.940.000	1.940.000	**100,00**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**59.750.400**	**59.750.400**	**100,00**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**59.750.400**	**59.750.400**	**100,00**
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	25.320.000	25.320.000	**100,00**

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	34.430.400	34.430.400	**100,00**
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**61.245.600**	**60.245.600**	**98,37**
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**61.245.600**	**60.245.600**	**98,37**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	3.506.000	3.506.000	**100,00**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.048.800	4.048.800	**100,00**
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.690.800	3.690.800	**100,00**
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	50.000.000	49.000.000	**98,00**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**2.573.124.604**	**2.407.392.291**	**93,60**
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Terfasiltasi Dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**3.683.600**	**3.683.600**	**100,00**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	860.000	860.000	**100,00**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	920.000	920.000	**100,00**

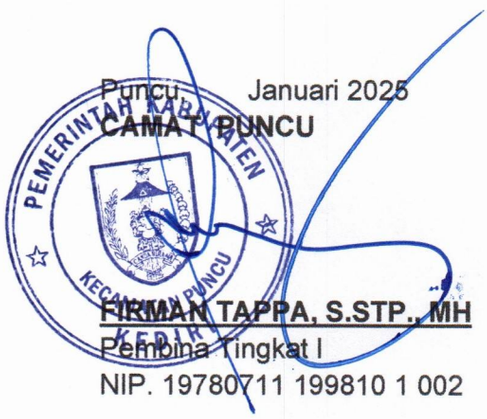
BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri ini diharapkan dapat menjadi sarana introspeksi diri, serta memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri telah dilaksanakan dengan baik. Capaian yang diperoleh tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh jajaran staf di Lingkungan Kecamatan Puncu yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, yang menggambarkan tujuan dan sasaran pada Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Puncu, Januari 2025
CAMAT PUNCU



FIRMAN TAPPA, S.STP., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19780711 199810 1 002

L A M P I R A N

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KECAMATAN PUNCU

Unit Organisasi : Kecamatan Puncu

Tahun : Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	3
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026

Instansi : Kecamatan Puncu

Visi : Mendukung Visi Kabupaten Kediri yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani”.

Misi : Mendukung Misi 2 Kabupaten Kediri yaitu “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PENGUKURAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : Kecamatan Puncu

Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2	3	4	5	6
Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp. 386.917.524,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp. 374.486.508,00